



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 570/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/X/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu adanya pembangunan zona integritas;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dan mengingat adanya pegawai Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang menjalani promosi dan mutasi pada bulan Oktober tahun 2024 perlu dibentuk tim baru untuk mempersiapkan dan melaksanakannya;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari



- Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 440/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VII/2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
- Menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan pembangunan zona integritas;
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus pada setiap indikator kerja pembangunan zona integritas;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 15 Oktober 2024  
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 570/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/X/2024

Tanggal : 15 Oktober 2024

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Pembina : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
Ketua : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
Koordinator Teknikal ZI : Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.  
Koordinator Operasional ZI : Yuri Adi Dharma, S.Kom.

Area I Manajemen Perubahan :

1. Koordinator : Riduansyah, S.H.I., M.H.  
2. Anggota : - Novrizki Primananda, S.Kom.  
- Norma Ayu Anggraini, A.Md.  
- Andi Ayu Lestari

Area II Penataan Tata laksana:

1. Koordinator : Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.  
2. Anggota : - Gina Rahayu, A.Md.  
- Muhammad Khaerwandi, S.H.

Area III penataan Sistem Manajemen SDM :

1. Koordinator : Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
2. Anggota : - Fathul Majid, S.H.I.  
- Nurhasanah, A.Md., S.H.  
- Gina Rahayu, A.Md.  
- Khaerul Arpani

Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Koordinator : Awaluddin Nur, S.H.I.  
2. Anggota : - Ana Syuryaningrum, S.H.I.  
- Kartika Cahya Robiyulina, S.H.  
- Nurhasanah, A.Md., S.H.  
- Marwan Nurahman, S.H.

Area V penguatan pengawasan :

1. Koordinator : Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.  
2. Anggota : - Yuri Adi Dharma, S.Kom./Marwan  
Nurahman, S.H.  
- Kartika Cahya Robiyulina, S.H.  
- Ana Syuryaningrum, S.H.I.  
- Fathul Majid, S.H.I.  
- Agus Fajri  
- Suwardi Thamrin



Area VI penguatan Kualitas Pelayanan publik :

1. Koordinator : Grace Ramayani Effendi, A.Md.
2. Anggota : - Ana Syuryaningrum, S.H.I.  
- Kartika Cahya Robiyulina, S.H.  
- Novrizki Primananda, S.Kom.  
- Suardi Thamrin  
- Agus Fajri

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



## Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 570/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/X/2024

Tanggal : 15 Oktober 2024

### URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

A. Penanggung Jawab, bertugas:

- Memberikan arahan mengenai pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

B. Ketua Tim, bertugas:

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

C. Tim Koordinator Teknikal ZI dan Koordinator Operasional ZI bertugas:

- Membantu tugas-tugas penanggung jawab dan Ketua Tim
- Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area I s/d Area VI dan Tim Survei, menerima bukti-bukti (eviden) dari masing-masing kelompok kerja dan tim survei dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* guna dokumentasi dan arsip;
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan tim survey dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan Ketua Tim Zona Integritas;

D. Kelompok Kerja (Area I s/d Area VI), bertugas:

- Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* serta menyerahkan kepada tim sekretariat;
- Melakukan survei kepada masyarakat pencari keadilan secara periodik;
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari masyarakat;
- Tim survei bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai hasil survei;
- Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;



- Membuat laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



## Lampiran III

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 570/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/X/2024

Tanggal : 15 Oktober 2024

## PEMBAGIAN KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA I		
No	Pemenuhan – Reform	Penanggung Jawab
1.	Penyusun tim kerja	Andi Ayu Lestari
2.	Rencana pembangunan zona integritas	Andi Ayu Lestari
3.	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	Novrizki Primananda, S.Kom.
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Norma Ayu Anggraini, A.Md.
5.	Komitmen dalam perubahan	Andi Ayu Lestari
6.	Komitmen pimpinan	Novrizki Primananda, S.Kom.
7.	Membangun budaya kerja	Norma Ayu Anggraini, A.Md.
AREA II		
No.	Pemenuhan – Reform	Penanggung jawab
1.	Standar operasional prosedur (SOP)	Gina Rahayu, A.Md.
2.	Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Muhammad Khaerwandi, S.H.
3.	Keterbukaan informasi publik	Muhammad Khaerwandi, S.H.
4.	Peta proses bisnis mempengaruhi	Gina Rahayu, A.Md.
4.	Transformasi digital memberikan nilai manfaat	Gina Rahayu, A.Md.
AREA III		
No.	Pemenuhan - Reform	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Nurhasanah, A.Md., S.H.
2.	Pola mutasi internal	Khairul Arpani
3.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Nurhasanah, A.Md., S.H.
4.	Penetapan kinerja individu	Khairul Arpani
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Fathul Majid, S.H.I.
6.	Sistem informasi kepegawaian	Fathul Majid, S.H.I.
7.	Kinerja individu	Gina Rahayu, A.Md.
8.	Assessment pegawai	Fathul Majid, S.H.I.
9.	Pelanggaran disiplin pegawai	Nurhasanah, A.Md., S.H.
AREA IV		
No.	Pemenuhan Reform	Penanggung Jawab
1.	Keterlibatan pimpinan	Marwan Nurahman, S.H.
2.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
3.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	Ana Syuryaningrum, S.H.I.
4.	Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Ana Syuryaningrum, S.H.I.
5.	Kerangka logis kinerja	Nurhasanah, A.Md., S.H.
AREA V		
No.	Pemenuhan - Reform	Penanggung Jawab
1.	Pengendalian gratifikasi	Marwan Nurahman, S.H.
2.	Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Yuri Adi Dharma, S.Kom./Marwan Nurahman, S.H.
3.	Pengaduan masyarakat	Agus Fajri
4.	<i>Whistle-blowing system</i>	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.



5.	Penanganan benturan kepentingan	Fathul Majid, S.H.I.
6.	Mekanisme pengendalian	Marwan Nurahman, S.H.
7.	Penanganan pengaduan masyarakat	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
8.	Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Suardi Thamrin
AREA VI		
No.	Pemenuhan - Reform	Penanggung Jawab
1.	Standar pelayanan	Suardi Thamrin
2.	Budaya pelayanan prima	Ana Syuryaningrum, S.H.I.
3.	Pengelolaan pengaduan	Agus Fajri
4.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
5.	Pemanfaatan teknologi informasi	Novrizki Primananda, S.Kom.
6.	Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik	Novrizki Primananda, S.Kom.
7.	Penanganan pengaduan pelayanan	Ana Syuryaningrum, S.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

